



# Zulkarnaen Akui DPRD Kecolongan Penggunaan APBD 2021



## ► Pembangunan Kantor Gubernur Dinilai Pemborosan

**PONTIANAK, SP** - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalbar, Zulkarnaen Siregar menilai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kalbar mengalami penurunan.

Dia mencontohkan pembahasan APBD tahun anggaran 2021 yang telah disahkan. Menurutnnya saat pembahasan, buku anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan ke DPRD pada waktu yang sangat mepet.

“Pembahasan sudah menuju waktu akan disahkan. Bagaimana bisa menelusuri anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara TPPAD buat buku anggaran secara global. Tingginya sampai hampir satu meter,”

kata Zulkarnaen, Minggu (24/1).

Legislator dari daerah pemilihan Kota Pontianak ini menilai apabila buku anggaran KUA-PPAS disampaikan lebih awal akan memberikan kesempatan ke

masing-masing komisi di DPRD Kalbar untuk dibahas lebih detail.

“Saya harap tahun 2022 buku anggaran KUA PPAS disampaikan lebih awal agar bisa dibahas setiap komisi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya,” tukasnya.

Masing-masing OPD disarankan Zulkarnaen harus memiliki buku anggaran tersendiri untuk dibahas

bersama dengan komisi di DPRD Kalbar agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

Dia juga berharap buku yang disampaikan eksekutif mengendap dipimpin DPRD Kalbar, dan ketika mendekat jadwal pengesahan, buku anggaran baru diberikan ke masing-masing komisi untuk baru disahkan

“Apa yang mau kita bahas jika waktu hanya sisa seminggu,





sementara OPD banyak, dan anggarannya besar," sebut dia,

Zulkarnaen juga menilai ada baiknya apabila pembahasan APBD dilakukan terbuka dan dihadiri berbagai kalangan, mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahkan media massa juga dihadirkan agar lebih terbuka dan dapat disampaikan ke masyarakat, kalau tidak ada yang ditutupim kenapa harus takut," tuturnya.

P a s a l n y a menurut Zulkarnaen, saat pembahasan APBD Kalbar tahun anggaran 2021, ada beberapa fraksi di DPRD Kalbar yang mengusulkan mencoret beberapa usulan pembangunan karena dianggap tidak penting.

"Ternyata sudah dibuat kesepakatan yang diajukan ke Menteri Dalam

Negeri (Mendagri), keluar lagi usulan yang dicoret, ini pelajaran bagi kami ke depan agar tidak lagi kecolongan," tegas Zulkarnaen.

Menurut Zulkarnaen, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, penanganan yang dilakukan Pemprov Kalbar sudah cukup baik untuk melindungi masyarakat Kalbar. Anggaran yang diajukan Pemprov Kalbar untuk penanganan Covid-19 juga selalu disetujui kalangan parlemen, meski laporan penggunaan anggaran kata dia tidak pernah disampaikan.

Meski begitu, Zulkarnaen menilai pembangunan fisik di Kalbar juga tidak bisa untuk tidak dianggap. Seperti contohnya perbaikan jalan rusak. Ini penting dilakukan kata dia untuk memberi dampak meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Tapi jangan malah pembangunan untuk jalan digunakan untuk pembangunan gedung," sebutnya.

Pembangunan gedung menggunakan dana APBD yang dimaksud Zulkarnaen adalah pembangunan

Kantor Gubernur Kalbar, pembangunan pagar di Dinas Perkebunan Kalbar yang menelan anggaran miliaran.

"Ini tidak terlalu penting. Kantor gubernur masih bagus dibangun lagi. Kantor gubernur peninggalan Pak Cornelis masih bagus. Ini kan pemborosan kalau sampai dibangun lagi dengan anggaran ratusan miliar," tegasnya.

Pembangunan gedung baru RSUD Soedarso yang baru juga tidak luput dari sorotan Zulkarnaen. Dia meminta aparat hukum fokus mengawasi penggunaan anggaran pembangunan di rumah sakit daerah tersebut.

"Saya berharap aparat penegak hukum fokus terhadap pembangunan RSUD Soedarso yang katanya mau dilelang kembali, ini saya bingung lelang bolak-balik tidak selesai-selesai, sebutnya.

Begitu juga dengan penjualan aset daerah dan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kapuas III. "Kita akan kawal ketat dan membahas masalah ini dengan serius," pungkasnya. (jee)